

Persepsi Petani Sawit Mandiri di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang Terhadap Sertifikasi ISPO

Hery Medianto Kurniawan ¹⁾, Rudy Triadi Yulianto ²⁾

¹⁾Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Panca Bhakti

²⁾STIE BoediOetomo

Email: herymedianto@upb.ac.id

Abstract

The Indonesian Sustainable Palm Oil certification is a government policy aimed at improving sustainable oil palm plantation governance, enhancing the competitiveness of Indonesian palm oil products, and ensuring plantation management aligns with economic, social, and environmental principles. The successful implementation of ISPO certification on smallholder plantations is heavily influenced by the perceptions of farmers, who are the primary actors in farm management. This study aims to analyze the perceptions of independent oil palm farmers in Radak Baru Village, Terentang District, regarding ISPO certification. The research was conducted from May to June 2026 using a survey method and a quantitative descriptive approach. The study location was selected purposively, and the respondents consisted of 30 independent oil palm farmers chosen via purposive sampling. Data collection involved observation, interviews, and the distribution of Likert-scale questionnaires. Research variables included knowledge of ISPO, economic benefits, environmental benefits, ease of implementation, and willingness to participate in certification. The results indicate that farmers' perceptions of ISPO certification generally fall into the "good" category, with an average score of 3.73. The environmental benefits indicator received the highest score (4.03), followed by willingness to participate (3.93), economic benefits (3.90), and knowledge of ISPO (3.67). Meanwhile, the ease of implementation indicator received the lowest score (3.13), indicating that farmers still face obstacles regarding administrative requirements, land legality, and certification procedures. The study concludes that independent oil palm farmers hold a positive perception of ISPO certification; however, increased outreach, technical assistance, the strengthening of farmer institutions, and the simplification of certification processes are still required to boost farmer participation in the implementation of ISPO certification.

Keywords: Farmer Perception, Oil Palm, Independent Oil Palm Farmer, ISPO Certification, Sustainability.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan lebih dari 16 juta hektare yang dikelola oleh perusahaan negara, swasta maupun perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap produksi nasional sehingga peningkatan kualitas pengelolaannya menjadi perhatian pemerintah (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024).

Seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk sawit yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia menetapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sistem sertifikasi wajib untuk menjamin bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi ISPO diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menggantikan regulasi sebelumnya. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia sekaligus memenuhi komitmen pembangunan berkelanjutan.

Bagi petani sawit mandiri, sertifikasi ISPO tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan akses pasar, peluang memperoleh harga jual yang lebih baik, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan kebun yang lebih ramah lingkungan (Purnomo et al., 2022). Namun demikian, implementasi sertifikasi ISPO pada perkebunan rakyat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengetahuan petani, rendahnya pemahaman mengenai

manfaat sertifikasi, biaya sertifikasi, legalitas lahan, serta kelembagaan petani yang belum optimal (Astuti et al., 2023).

Persepsi petani menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi ISPO. Menurut Robbins dan Judge (2022), persepsi merupakan proses individu dalam mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sehingga membentuk pemahaman terhadap suatu objek atau kebijakan. Persepsi yang positif akan meningkatkan kemauan petani mengikuti sertifikasi, sedangkan persepsi negatif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Desa Radak Baru Kecamatan Terentang merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kubu Raya. Sebagian besar petani mengelola kebun secara mandiri dengan karakteristik kepemilikan lahan relatif kecil. Hingga saat ini belum seluruh petani memahami secara komprehensif mengenai tujuan, manfaat maupun persyaratan sertifikasi ISPO. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi petani terhadap sertifikasi ISPO menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pendampingan dan peningkatan kapasitas petani. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani sawit mandiri di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi dipilih secara purposive karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Penelitian dilaksanakan selama Mei–Juni 2026.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah seluruh petani sawit mandiri di Desa Radak Baru sebanyak 214 petani. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan (margin of error) sebesar 17%, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + N.e^2) \\ n &= 214 / (1 + 214 \times 0,17^2) \\ n &= 214 / (1 + 6,18) \\ n &= 214 / 7,18 \\ n &= 29,79 \approx 30 \text{ petani} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 30 orang petani. Responden selanjutnya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: memiliki kebun sawit minimal 2 tahun; mengusahakan kebun secara mandiri; dan bersedia menjadi responden. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling digunakan apabila peneliti menentukan responden berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Variabel yang diamati terdiri atas lima indikator persepsi dengan indikator : pengetahuan mengenai ISPO, manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, kemudahan pelaksanaan dan kesediaan mengikuti sertifikasi. Pengukuran menggunakan Skala Likert 1 – 5 (sangat tidak setuju – sangat setuju). Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator yang dikembangkan dari kajian teori dan penelitian terdahulu (Robbins & Judge, 2022; Rogers, 2003; Ajzen, 1991), sehingga validitas isi (content validity) instrumen telah dipenuhi melalui penyusunan indikator secara teoretis serta telaah oleh dosen pembimbing sebelum digunakan di lapangan. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dengan sampel yang ditentukan secara purposive, pengujian validitas dan reliabilitas secara statistik (misalnya uji korelasi Pearson dan Cronbach's Alpha) belum dilakukan pada penelitian ini dan menjadi keterbatasan yang perlu ditindaklanjuti pada penelitian selanjutnya dengan jumlah responden yang lebih besar. Analisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi, presentase dan mean. Sangat Baik 4,21–5,00; Baik 3,41–4,20; Cukup 2,61–3,40; Kurang 1,81–2,60 dan Sangat Kurang 1,00–1,80.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Petani Terhadap Sertifikasi ISPO

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani sawit mandiri di Desa Radak Baru terhadap indikator pengetahuan mengenai sertifikasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67, yang termasuk dalam kategori baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui keberadaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Perbedaan tingkat pengetahuan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan, pengalaman usahatani. Menurut Robbins dan Judge (2022), persepsi seseorang terbentuk melalui proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap informasi yang diterima. Semakin banyak informasi yang dimiliki seseorang mengenai suatu objek, maka semakin positif persepsi yang akan terbentuk. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan merupakan fondasi awal yang menentukan bagaimana petani menilai keberadaan sertifikasi ISPO. Pengetahuan yang baik akan mendorong petani memahami bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk meningkatkan penghentian usaha perkebunan. Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003). Rogers menyatakan bahwa tahap pertama dalam proses adopsi suatu inovasi adalah pengetahuan, yaitu ketika individu mulai mengetahui keberadaan suatu inovasi dan memahami cara kerja. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin besar peluang inovasi tersebut diterima. Dalam konteks penelitian ini, ISPO merupakan suatu inovasi kelembagaan dan tata kelola perkebunan yang memerlukan pemahaman petani sebelum mereka memutuskan untuk mengadopsinya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti dkk. (2023) yang menemukan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi sertifikasi ISPO pada perkebunan rakyat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar petani belum memahami secara utuh manfaat sertifikasi maupun persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masih enggan mengikuti proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan petani mengenai ISPO masih menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar informasi mengenai sertifikasi ISPO dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh petani sawit mandiri.

Persepsi Petani terhadap Manfaat Ekonomi Sertifikasi ISPO

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator manfaat ekonomi memperoleh nilai rata-rata 3,90 dengan kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki keyakinan bahwa sertifikasi ISPO mampu memberikan manfaat ekonomi bagi usaha perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola. Persepsi positif tersebut tercermin dari tingginya jumlah responden yang menyatakan setuju bahwa sertifikasi ISPO dapat meningkatkan peluang pemasaran hasil panen, memperluas akses terhadap lembaga pembiayaan, meningkatkan produktivitas kebun, serta memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pemasaran kelapa sawit.

Persepsi tersebut menunjukkan bahwa petani mulai memahami bahwa sertifikasi tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha tani. Melalui penerapan standar budidaya yang baik, penggunaan input produksi yang sesuai rekomendasi, serta pencatatan usaha tani secara sistematis, petani berpeluang memperoleh produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas hasil panen yang lebih baik. Kondisi ini pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dalam jangka panjang.

Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2024), salah satu tujuan utama penerapan ISPO adalah meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia melalui perbaikan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan. Sertifikasi juga menjadi salah satu syarat yang semakin diperhatikan oleh industri pengolahan maupun pasar internasional dalam membeli bahan baku kelapa sawit. Dengan demikian, petani yang telah menerapkan prinsip ISPO memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dibandingkan petani yang belum menerapkan praktik budidaya berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa responden yang memberikan jawaban netral.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian petani belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari sertifikasi ISPO. Mereka beranggapan bahwa harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani masih relatif sama dengan petani yang belum bersertifikat. Persepsi tersebut cukup wajar mengingat penerapan ISPO pada perkebunan rakyat di Indonesia masih terus berkembang sehingga manfaat ekonomi langsung belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh petani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan insentif ekonomi bagi petani bersertifikat agar manfaat sertifikasi dapat dirasakan secara nyata.

Persepsi Petani terhadap Manfaat Lingkungan Sertifikasi ISPO

Indikator manfaat lingkungan memperoleh nilai rata-rata 4,03, yang merupakan skor tertinggi di antara seluruh indikator penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa petani memiliki persepsi yang sangat baik terhadap manfaat lingkungan yang dihasilkan melalui penerapan sertifikasi ISPO. Mayoritas responden menyadari bahwa praktik budidaya kelapa sawit yang sesuai standar ISPO mampu menjaga kualitas lingkungan, mengurangi polusi, meningkatkan konservasi lahan, serta mendorong penggunaan pupuk dan pestisida secara lebih bijaksana. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa isu keberlanjutan lingkungan telah mulai dipahami oleh petani sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan budidaya kelapa sawit. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai isu mengenai perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan lingkungan akibat praktik budidaya yang tidak berkelanjutan telah banyak disampaikan melalui media massa, penyuluhan, maupun kegiatan pemerintah. Kondisi tersebut turut membentuk persepsi petani bahwa pengelolaan kebun yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan untuk menjaga keinginan usaha tani dalam jangka panjang.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa salah satu prinsip utama sertifikasi ISPO adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan. Prinsip tersebut meliputi pengelolaan limbah, konservasi kawasan bernilai konservasi tinggi, perlindungan sumber daya udara, serta penggunaan bahan kimia secara bertanggung jawab. Dengan demikian, tingginya persepsi petani terhadap manfaat lingkungan menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat di tingkat petani.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hidayat dkk. (2021) yang menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong petani menerima inovasi pertanian berkelanjutan. Semakin tinggi kesadaran petani terhadap pentingnya menjaga lingkungan, maka semakin besar peluang mereka untuk mengadopsi praktik budidaya yang sesuai dengan standar sertifikasi.

Persepsi Petani terhadap Kemudahan Penerapan Sertifikasi ISPO

Berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator kemudahan pelaksanaan memperoleh nilai rata-rata 3,13, yang termasuk dalam kategori cukup. Nilai tersebut merupakan skor terendah dibandingkan indikator lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih menganggap proses sertifikasi ISPO relatif sulit untuk dilaksanakan. Kekhawatiran yang dirasakan petani terutama berkaitan dengan persyaratan administrasi, legalitas lahan, penyusunan dokumen, pencatatan kegiatan usaha tani, biaya sertifikasi, serta kurangnya pendampingan dari tenaga teknis. Sebagian petani juga mengaku belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi sehingga menganggap proses tersebut rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut Rogers (2003), tingkat kompleksitas (*kompleksitas*) suatu inovasi sangat mempengaruhi kecepatan adopsinya. Inovasi yang dianggap rumit akan lebih lambat diterima oleh masyarakat dibandingkan inovasi yang mudah dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, persepsi mengenai tingginya kompleksitas sertifikasi ISPO menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi petani. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ISPO tidak hanya ditentukan oleh kesediaan petani, tetapi juga bergantung pada dukungan kelembagaan, pendampingan teknis, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Pemerintah daerah bersama dinas terkait perlu meningkatkan layanan pendampingan agar petani

memperoleh bantuan dalam memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi.

Persepsi Petani terhadap Kesiediaan mematuhi Sertifikasi ISPO

Indikator kesiediaan mengikuti sertifikasi memperoleh nilai rata-rata 3,93 dengan kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki keinginan untuk mengikuti sertifikasi ISPO jika memperoleh informasi, pendampingan, dan dukungan dari pemerintah maupun kelompok tani. Kesiediaan tersebut menunjukkan bahwa secara psikologis petani telah memiliki sikap yang positif terhadap sertifikasi program. Menurut Ajzen (1991), niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi mengenai kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, persepsi positif terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan membentuk sikap positif petani terhadap sertifikasi ISPO. Namun, niat tersebut belum sepenuhnya terwujud menjadi tindakan nyata karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi, biaya, dan prosedur pelaksanaan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka bersedia mengikuti sertifikasi jika proses didampingi oleh pemerintah atau koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi petani. Pendekatan sertifikasi secara kelompok dinilai lebih efektif karena mampu mengurangi biaya sertifikasi, meningkatkan efisiensi pendampingan, serta memperkuat kerja sama antarpetani.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap sertifikasi ISPO sudah berada pada arah yang positif. Oleh karena itu, strategi pengembangan sertifikasi di Desa Radak Baru sebaiknya dikonsentrasikan pada peningkatan pengetahuan, prosedur penyederhanaan, serta penguatan kelembagaan petani sehingga persepsi positif yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi partisipasi nyata dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap sertifikasi ISPO secara umum berada pada kategori baik dengan rata-rata keseluruhan sebesar 3,73. Temuan ini mengindikasikan bahwa petani telah memiliki pandangan positif terhadap keberadaan ISPO, terutama terkait manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan. Persepsi positif tersebut dapat menjadi modal sosial dalam memperluas implementasi sertifikasi pada perkebunan rakyat. Di sisi lain, indikator kemudahan pelaksanaan memperoleh skor paling rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan teknis masih menjadi kendala utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa legalitas lahan, biaya sertifikasi, dan keterbatasan pendampingan merupakan hambatan utama implementasi ISPO pada perkebunan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Petani Sawit Mandiri di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang terhadap Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dapat disimpulkan bahwa secara umum persepsi petani terhadap sertifikasi ISPO berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,73. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah memiliki pandangan yang positif terhadap penerapan sertifikasi ISPO sebagai upaya meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pada indikator pengetahuan mengenai ISPO, petani telah mengenal keberadaan sertifikasi ISPO dan memahami bahwa program tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, pemahaman petani mengenai prinsip, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Pada indikator manfaat ekonomi, mayoritas petani berpendapat bahwa sertifikasi ISPO dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha perkebunan, antara lain meningkatkan peluang akses pasar, memperkuat daya saing produk, memperbaiki praktik budidaya, serta membuka peluang memperoleh akses pembiayaan. Meskipun demikian, sebagian petani masih belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung sehingga diperlukan kebijakan yang mampu memberikan insentif bagi petani yang telah menerapkan standar ISPO. Indikator manfaat lingkungan memperoleh penilaian tertinggi

dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya penerapan praktik budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas lahan, kelestarian sumber daya alam, serta keberlanjutan usaha perkebunan. Sementara itu, indikator kemudahan pelaksanaan sertifikasi memperoleh nilai terendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa petani masih menghadapi berbagai kendala dalam mengikuti proses sertifikasi, terutama berkaitan dengan legalitas lahan, kelengkapan administrasi, pencatatan usaha tani, biaya sertifikasi, dan keterbatasan pendampingan teknis. Hambatan tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan implementasi sertifikasi ISPO pada perkebunan rakyat belum berjalan secara optimal. Pada indikator kesediaan mengikuti sertifikasi, sebagian besar petani menyatakan bersedia mengikuti program sertifikasi ISPO apabila memperoleh dukungan berupa penyuluhan, pendampingan teknis, bantuan pembiayaan, serta fasilitasi dari pemerintah maupun kelembagaan petani. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi positif petani telah terbentuk, namun masih memerlukan dukungan kebijakan agar dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi nyata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit rakyat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan persepsi petani, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, penguatan kelembagaan petani, kemudahan prosedur sertifikasi, serta dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah petani sawit mandiri yang menerapkan sertifikasi ISPO secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Astuti, R., Prasetyo, A., & Wibowo, A. (2023). *Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification among Independent Smallholders*. *Journal of Sustainable Agriculture*, 15(2), 112–126.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2023–2025*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Purnomo, H., Dewi, S., & Santoso, H. (2022). Sustainable palm oil certification and smallholder competitiveness in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114, 012045.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational Behavior* (19th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.